



Yogya dan Kulonprogo Aman dari Penundaan

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dapat bernapas lega. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak memasukkan Kota Yogyakarta ke dalam daftar sejumlah daerah yang penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)-nya ditunda.

"Ya kami sudah mengetahui DAU dari Kemenkeu ke Kota Yogyakarta tidak ikut ditunda," ujar Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Kamis (1/9).

Dia berpendapat, alasan Kota Yogyakarta tak masuk dalam daftar tersebut lantaran serapan APBD Kota Yogyakarta 2015 tergolong baik. Seperti diketahui pada tahun lalu, serapan APBD Kota Yogyakarta di tahun 2015 hampir mencapai 90 persen.

"Tapi saya belum bisa memastikan, apakah memang benar serapan yang menjadi penilaian. Dari Kemenkeu tidak memberikan penjelasan," sam-

bungnya.

Akan tetapi sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) nomor 235/2015 pada Desember 2015 lalu. Kemenkeu mengatur sanksi terhadap daerah yang menyimpan kasnya di bank terlalu banyak, dan malah tidak segera membelanjakannya.

"Aturan di Permenkeu itu, daerah yang terlalu banyak menyimpan uang di kas daerah, DAU dan DBH (Dana Bagi Hasil)-nya ditunda diberikan. Diganti dengan SBN (Surat Berharga Negara)," jelas Kadri.

Serapan bagus

Anggota Parampara Praja DIY, Prof Edy Suandi Hamid menjelaskan berdasarkan Permenkeu nomor 125/2016, di DIY hanya Yogyakarta dan Kulonprogo saja yang DAU-nya tak ditunda. Dia setuju jika daerah yang serapannya rendah, penyaluran DAU-nya ditunda.

"Saya kira itu baik. Supaya daerah-daerah itu betul-betul serius da-

lam membuat perencanaan dan penganggaran," jelas Guru Besar FE UII itu.

Dengan begitu, menurutnya hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi daerah untuk melakukan kajian anggaran, sehingga anggaran yang disusun dapat disalurkan secara efektif dan efisien. Dia pun memandang, dampak dari kebijakan ini tak terlalu besar.

"Tidak terlalu besar karena tahun anggaran juga tinggal empat bulan. Lagipula bagi daerah yang serapannya rendah dan saldonya tinggi, dampaknya tidak akan terlalu besar," tegasnya.

Namun, dia berharap, penundaan penyaluran DAU ke daerah tak berlanjut sampai tahun depan. Jika tahun depan ditunda lagi, Edy memprediksi akan terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan berdampak ke pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah pusat juga sebaiknya

● ke halaman 11

Yogya dan Kulonprogo Aman

● Sambungan Hal 1

lebih hati-hati dalam membuat dan mengelola anggarannya. Jangan sampai saat ada masalah, daerah diminta berkorban," katanya.

Hanya menunda

Selain itu, mantan Rektor UII tersebut juga berharap, pemerintah pusat menyampaikan kebijakan yang diambilnya sekarang ini hanya penundaan penyaluran DAU, bukan pemotongan anggaran seperti yang beredar di masyarakat saat ini.

Terkait lolosnya Kulonprogo dari daftar daerah yang DAU-nya ditunda, Pemkab tidak melakukan perubahan apapun terkait alokasi anggaran tersebut.

Sekda Kulonprogo, RM Astungkoro, mengatakan Kulonprogo selama ini telah melakukan penyusunan anggaran sesuai arahan kementerian saat itu.

Pada intinya, dalam penyimpanan anggaran pada kas daerah tidak sampai melebihi kebutuhan atau tiga hingga empat kali dari kebutuhan dalam sebulan.

"Jadi terkait keputusan Menteri Keuangan itu, alhamdulillah Kulonprogo tidak termasuk dari 169 daerah yang terkena pemangkasan anggaran itu. Kulonprogo tidak harus memangkas anggaran," kata Astungkoro.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan adanya pemangkasan anggaran hingga mencapai Rp 137,65 triliun. Pemangkasan itu sendiri terdiri atas alokasi be-

lanja kementerian dan lembaga, di antaranya juga terhadap belanja transfer dan anggaran dana desa.

Sesuai perhitungan

Disebutkan, pemangkasan alokasi di kementerian dan lembaga mencapai Rp 64,7 triliun. Untuk belanja transfer ke daerah, pemangkasanya mencapai Rp 70,13 triliun. Adapun untuk anggaran dana desa dipangkas hingga Rp 2,82 triliun.

Selain itu, pemangkasan juga dilakukan pada alokasi khusus non fisik, seperti tunjangan dan dana tambahan penghasilan guru, dan anggaran dana transfer umum berupa dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Adapun alasan pemangkasan anggaran itu antara lain karena tidak semua daerah siap menyerap dana desa yang dimaksud. Alasan

lain adalah karena anggaran untuk guru dianggap over budgeting setelah terjadi perbedaan alokasi dan jumlah guru.

Jika temuan itu memang terjadi di beberapa daerah lain, tidak demikian di Kulonprogo. Astungkoro mengatakan Pemkab Kulonprogo menggunakan anggaran sesuai perhitungan.

Dengan demikian, selama ini tidak ada masalah dalam hal penggunaan anggaran di Kulonprogo. "Sehingga kami tidak termasuk yang kena pinalti," kata Sekda.

Astungkoro pun menegaskan Kulonprogo tidak perlu melakukan pemangkasan anggaran atau menyiapkan siasat apapun terkait hal itu. "Begitu mendapat keputusan presiden kami melihat tidak ada kewajiban itu," lanjutnya. (mrt/ose)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005